ABSTRAK

NADIA, NPM: 2022202, Judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PATIN OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**". Dibawah bimbingan **Ibu Siti Raudah, S.Sos., M.AP., CHCM., CELM** sebagai Dosen Pembimbing I dan **Ibu Sri Agusmila Aneta Herlinda, S.Pd., M.AP** sebagai Dosen Pembimbing II.

Sektor perikanan budidaya, khususnya ikan patin, sebagai komoditas unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan daerah. Dinas Perikanan melaksanakan kebijakan pemberdayaan melalui pembinaan teknis, sosialisasi, pendampingan usaha, serta pemberian bantuan sarana produksi. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, jumlah penyuluh yang terbatas, serta pendampingan yang belum dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan optimal dan tujuan pemberdayaan belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap informan yang berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, penyuluh perikanan, serta perwakilan kelompok pembudidaya ikan patin. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, objektif, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi program belum diterima secara merata oleh seluruh pembudidaya sehingga memengaruhi tingkat pemahaman dan partisipasi. Pada aspek sumber daya, keterbatasan fasilitas pendukung serta jumlah tenaga penyuluh menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan. Selain itu, pendampingan yang belum berkelanjutan berdampak pada rendahnya keterlibatan kelompok dalam kegiatan pemberdayaan.

Disarankan agar Dinas Perikanan meningkatkan pemerataan informasi program, memperkuat koordinasi antarbidang, menambah jumlah serta kapasitas penyuluh, dan menyediakan sarana pendukung yang memadai. Monitoring dan evaluasi rutin perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program. Pendampingan intensif diharapkan mampu meningkatkan kapasitas teknis pembudidaya, memperkuat kelembagaan kelompok, serta mendorong tercapainya tujuan pemberdayaan secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

NADIA, NPM: 2022202, title: "**IMPLEMENTATION OF THE POLICY FOR EMPOWERING CATFISH FARMER GROUPS BY THE FISHERIES DEPARTMENT OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY"**. Under the guidance of **Mrs. Siti Raudah, S.Sos., M.AP., CHCM., CELM** as Supervisor I and **Mrs. Sri Agusmila Aneta Herlinda, S.Pd., M.AP** as Supervisor II.

The aquaculture sector, particularly catfish farming, is a leading commodity in Hulu Sungai Utara Regency that plays an important role in increasing community income, creating employment opportunities, and supporting regional food security. The Fisheries Department implements empowerment policies through technical guidance, program socialization, business assistance, and the provision of production facilities. However, several constraints remain in the implementation process, including uneven information dissemination, limited supporting infrastructure, a shortage of extension workers, and insufficient continuous assistance. These conditions cause the program implementation to be less optimal and the empowerment objectives to be not fully achieved as expected.

This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving informants from the Fisheries Department of Hulu Sungai Utara Regency, fisheries extension workers, and representatives of catfish farmer groups. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing to obtain comprehensive, objective, and field-based findings.

The results indicate that the implementation of the empowerment policy has not been optimal. In the communication aspect, program information has not been evenly received by all farmers, which affects their level of understanding and participation. In terms of resources, limited supporting facilities and the number of extension personnel become obstacles in implementing training and guidance activities. In addition, insufficient continuous assistance results in low group involvement in empowerment programs.

It is recommended that the Fisheries Department improve the distribution of program information, strengthen interdepartmental coordination, increase the number and capacity of extension workers, and provide adequate supporting facilities. Routine monitoring and evaluation should be enhanced to ensure program sustainability. Intensive assistance is expected to improve farmers' technical capacity, strengthen group institutions, and encourage the achievement of empowerment objectives effectively, sustainably, and with a real impact on community welfare.